



EFEKTIVITAS KOORDINASI BAPPERIDA DALAM PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF

Margareta Febriyanti More Mangara Putri¹, Imanuel Wellem², Paulus Juru³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: febimore@gmail.com

Abstract

This research analyzed the effectiveness of the Regional Planning, research, and Innovation Agency in implementing the Holistic Integrative Early Childhood Education Policy in Sikka Regency. This research used a descriptive qualitative approach through interviews and documentation. The findings indicated that the regional development planning, research, innovation agency's coordination was relatively effective, as reflected in structured communication, clear division of tasks, and the participation of regional government agencies. However, strengthening cross-sectoral coordination was still needed, particularly at the village level.

Keywords : Coordination, Holistic Integrative Early Childhood Education

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Efektivitas Koordinasi BAPPERIDA Dalam Penyelenggaraan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Sikka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BAPPERIDA tergolong cukup efektif, ditandai dengan komunikasi yang terstruktur, pembagian tugas yang jelas, dan partisipasi perangkat daerah. Namun, penguatan koordinasi lintas sektor masih diperlukan, khususnya di tingkat desa.

Kata Kunci : Koordinasi, PAUD Holistik Integratif.

Pendahuluan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sikka melalui Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) memiliki peran strategis

dalam merumuskan, mengoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan di sektor pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi fokus koordinasi adalah Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI). Sari et al. (2023:127) menjelaskan bahwa pendidikan holistik integratif merupakan model pembelajaran yang menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak secara simultan dan menyeluruh dalam satu rangkaian kegiatan. Sejalan dengan itu, Ligina et al. (2022:8) menegaskan bahwa pendekatan ini memperhatikan seluruh kebutuhan perkembangan anak secara utuh dalam proses pembelajaran dan bermain. Implementasi PAUD HI di Kabupaten Sikka telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 serta diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standarisasi Layanan Penyelenggaraan PAUD HI yang mencakup standar pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan responsif, perlindungan, kesejahteraan, dan kebencanaan.

Perkembangan layanan PAUD di Kabupaten Sikka menunjukkan peningkatan jumlah satuan pendidikan, namun pemerataan dan kualitas layanan masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Indikator	Nilai
Angka kematian ibu	49.10 %
Angka kematian bayi	11.50 %
Kasus gizi kurang pada anak usia 0 – 59 bulan	1.374 anak
Kasus gizi buruk pada anak usia 0 – 59 bulan	179 anak

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah lembaga PAUD cukup banyak, masih terdapat kesenjangan dalam akreditasi, kualifikasi pendidik, dan ketersediaan layanan di seluruh desa. Hal ini menegaskan perlunya penguatan implementasi PAUD HI secara terintegrasi agar layanan pendidikan anak usia dini dapat merata dan berkualitas.

Selain aspek pendidikan, PAUD HI juga menuntut integrasi dengan layanan kesehatan dan gizi. Kondisi kesehatan ibu dan anak usia dini di Kabupaten Sikka dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Indikator	Nilai
Angka kematian ibu	49.10 %
Angka kematian bayi	11.50 %
Kasus gizi kurang pada anak usia 0 – 59 bulan	1.374 anak
Kasus gizi buruk pada anak usia 0 – 59 bulan	179 anak

Sumber : Dinas Kesehatan 2024

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak usia dini tidak hanya membutuhkan stimulasi pendidikan, tetapi juga dukungan kesehatan dan gizi yang memadai. Wulandari (2021:157) menyatakan bahwa edukasi gizi pada ibu hamil dapat meningkatkan perilaku pencegahan stunting, sedangkan Budiarti et al. (2022:224) menekankan pentingnya kegiatan parenting tentang gizi seimbang pada masa golden age. Dalam konteks sosial ekonomi, Agusman et al. (2024:47) menjelaskan bahwa kemiskinan menyebabkan eksklusi sosial terhadap akses pendidikan dan kesehatan, sehingga PAUD HI menjadi strategi penting dalam pembangunan manusia untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi. Keberhasilan PAUD HI sangat bergantung pada efektivitas koordinasi lintas sektor yang dipimpin oleh BAPPERIDA sebagai koordinator utama. Pasaribu (2022:160) mendefinisikan koordinasi sebagai upaya kerja sama antarinstansi untuk mencapai tujuan bersama secara harmonis. Namun, hasil wawancara menunjukkan masih terdapat kendala, seperti belum terbentuknya Sub Gugus Tugas PAUD HI di tingkat desa, belum optimalnya pemenuhan standar layanan, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum meratanya implementasi RAD PAUD HI, serta belum diterapkannya mekanisme sanksi secara tegas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lailia et al. (2021), Nurpahdi et al. (2025), dan Edo et al. (2025) yang menunjukkan bahwa lemahnya komitmen stakeholder, tidak rutinnya forum koordinasi, serta ketidakjelasan pembagian tugas sering menjadi hambatan efektivitas koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan kondisi tersebut. Pada titik inilah peran BAPPERIDA menjadi sangat strategis sebagai koordinator utama dan sekretariat dalam implementasi kebijakan PAUD HI. Sesuai tugas dan fungsinya, BAPPERIDA memastikan integrasi perencanaan, sinkronisasi program lintas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan layanan PAUD HI.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep utama dalam ilmu administrasi negara yang berhubungan langsung dengan proses pemerintahan. Menurut (Raudah 2023:1208), Kebijakan Publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Artinya, kebijakan publik tidak hanya terbatas pada tindakan, tetapi juga pada keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu persoalan Masyarakat. Dalam konteks ini, peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menjadi sangat strategis karena bertanggung jawab dalam perencanaan, pengoordinasian, dan pengintegrasian kebijakan pembangunan daerah. Penyelenggaraan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), BAPPERIDA berperan sebagai koordinator lintas sektor yang memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program daerah yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Melalui fungsi perencanaan dan koordinasi, BAPPERIDA menyelaraskan peran perangkat daerah terkait, seperti seperti Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta **Dinas** Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PAUD HI dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini di daerah.

Implementasi Kebijakan Publik dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Tujuan PAUD Holistik Integratif

1. Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya sumber daya anak daerah yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya.
2. Tujuan khusus PAUD HI adalah :
 - a) Terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur

- b) Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
- c) Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah
- d) Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan PAUD HI

BAPPERIDA Sebagai Sekretariat PAUD Holistik Integratif

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sikka mengacu pada Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 379/HK/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 128/HK/2023 Tentang Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Tahun 2023 di tingkat Kabupaten Sikka dibentuk Sekretariat PAUD HI yang dikoordinasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka. Tugas utama Sekretariat PAUD HI adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan teknis operasional kepada Gugus Tugas.
- b. Menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, advokasi, integrasi, dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas.
- c. Menyiapkan bahan rencana program kerja Gugus Tugas.
- d. Memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas dengan SKPD yang menjadi anggota Gugus Tugas.
- e. Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas; dan
- f. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan SKPD terkait dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Konsep Koordinasi

Menurut Hasibuan (dalam Septi at al.,2022:538) Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur - unsur manajemen yaitu : *men, money, method, materials, machines, dan market* juga pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa indikator untuk mengukur koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi.

3. Pembagian Kerja

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri.

4. Disiplin

Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Menurut Kuntadi (2022:147) Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan

secara efisien dan efektif. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam organisasi maupun dari lingkungan eksternal, dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya koordinasi antar instansi yang terlibat, dan struktur kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam menentukan sejauh mana koordinasi dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pentingnya Koordinasi dalam Efektivitas Kebijakan PAUD HI

Menurut Widjaja (2025:1324) Pentingnya koordinasi semakin terasa ketika dihadapkan pada kompleksitas permasalahan sosial yang harus ditangani secara lintas sektor, seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Koordinasi berperan penting dalam menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program PAUD HI antar instansi terkait. Melalui koordinasi, setiap perangkat daerah dapat menyusun program dan kegiatan yang saling mendukung serta sejalan dengan tujuan bersama. Koordinasi juga memungkinkan terjadinya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas, sehingga masing-masing instansi dapat fokus menjalankan fungsi sesuai kewenangannya tanpa tumpang tindih program.

Dalam konteks efektivitas kebijakan, koordinasi berfungsi sebagai penghubung antar aktor kebijakan agar pelaksanaan PAUD HI berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Efektivitas kebijakan PAUD HI dapat dilihat dari sejauh mana layanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan esensial anak secara menyeluruh dan terpadu. Koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa layanan pendidikan terintegrasi dengan layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak, sehingga anak usia dini memperoleh layanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan PAUD HI. Melalui forum koordinasi, instansi terkait dapat berbagi data, informasi, dan pengalaman lapangan sehingga permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi dan ditangani secara bersama.

Koordinasi BAPPERIDA Terhadap Kebijakan PAUD Holistik Integratif

BAPPERIDA merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Sikka. Pada program penerapan layanan PAUD Holistik Integratif ini, lebih terkhusus ditangani oleh bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia (PPM). Berdasarkan Dokumen RAD peran BAPPERIDA dalam proses penyelenggaraan kebijakan ini Adalah sebagai Koordinator dan sekaligus sekretariat pelaksanaan penerapan layanan ini. Bersama Dinas dan beberapa instansi BAPPERIDA terbentuk kedalam Tim Gugus Tugas. Proses penerapan layanan PAUD Holistik Integratif Tim Gugus tugas melakukan Penyelarasan dasar hukum yang mengacu pada undang-undang resmi.

Hasil peneltian yang dilakukan Evarista (2025:2991) BAPPERIDA merupakan salah satu instansi yang berperan penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di kabupaten Sikka. Pada program penerapan layanan Paud Holistik Integratif ini, lebih terkhusus ditangani oleh bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia (PPM). Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan PAUD HI, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2017, BAPPERIDA mengusulkan Peraturan Bupati (Perbub) sebagai tindak lanjut implementasi kebijakan tersebut. Peraturan Daerah ini kemudian diadaptasi ke dalam Peraturan Bupati yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dan langkah-langkah operasional untuk mendukung kebijakan Paud HI.

Metode Penulisan laporan

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Kerlinger (dalam Fathalah,2020:1) Wawancara adalah peran situasi tatap muka interpersonal dimana satu orang (interviewe), bertanya kepada satu orang yang

diwawancarai, beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan masalah penelitian. Narasumber wawancara dilakukan pada Pejabat Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) BAPPERIDA.

2. Observasi

Menurut Hasanah dalam (Raudhatul : 2024:61) Observasi adalah metode sistematis untuk mengamati aktivitas manusia dan lingkungan fisik di mana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus di tempat kegiatan alami, dengan tujuan mengumpulkan informasi. Peneliti mengamati kondisi layanan PAUD di Kabupaten Sikka, seperti mengamati lembaga PAUD yang tergolong PAUD HI.

3. Dokumen yang ditelaah meliputi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standarisasi Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Dokumen Rencana Aksi Daerah PAUD HI (RAD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Teknik Analisis Data

1. *Data Collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan seluruh informasi terkait mekanisme koordinasi BAPPERIDA, pola komunikasi antar-perangkat daerah, proses perencanaan bersama, serta implementasi layanan PAUD HI melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.
2. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang paling relevan dengan efektivitas koordinasi, seperti alur koordinasi, peran masing-masing OPD, hambatan koordinatif, dan kesesuaian implementasi lintas sektor. Data yang tidak relevan, lemah, atau

kurang mendukung dianalisis ulang dan disisihkan agar menghasilkan fokus analisis yang tajam.

3. *Data Display* (penyajian data), yaitu menyusun data terpilih ke dalam bentuk uraian sistematis, bagan alur koordinasi, tabel temuan, atau ringkasan tematik sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai proses koordinasi BAPPERIDA dan pelaksanaan PAUD HI di lapangan.
4. *Data Verification* atau *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan), yaitu merumuskan Kesimpulan mengenai Tingkat efektivitas koordinasi BAPPERIDA berdasarkan pola data yang konsisten, termasuk identifikasi keberhasilan, kelemahan, serta faktor yang memengaruhi koordinasi dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Sikka.

Hasil Dan Pembahasan

Efektivitas Koordinasi BAPPERIDA dalam Penyelenggaraan Kebijakan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Sikka

Efektivitas koordinasi BAPPERIDA dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif tercermin melalui perannya sebagai koordinator dan sekretariat Gugus Tugas PAUD HI berdasarkan RAD PAUD HI Kabupaten Sikka 2024–2028 serta SK Bupati tentang Gugus Tugas PAUD HI. BAPPERIDA mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan lintas sektor pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak melalui mekanisme perencanaan terpadu dan pembagian tugas yang jelas. Koordinasi dilaksanakan melalui forum Gugus Tugas, rapat lintas sektor, komunikasi resmi, serta media digital. Pembagian kerja telah diatur dalam RAD sehingga mengurangi tumpang tindih kewenangan. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan ketercapaian target, meskipun koordinasi di tingkat desa, khususnya pembentukan Sub Gugus Tugas, belum sepenuhnya optimal. Secara umum, koordinasi dinilai cukup efektif dalam

aspek perencanaan, komunikasi, dan pembagian peran, namun masih memerlukan penguatan pada tingkat operasional.

4.4.2 Kendala yang Dihadapi BAPPERIDA dalam Pelaksanaan Koordinasi PAUD Holistik Integratif

Pelaksanaan koordinasi PAUD Holistik Integratif masih menghadapi beberapa kendala. Belum terbentuknya Sub Gugus Tugas PAUD HI di seluruh desa menyebabkan koordinasi, komunikasi, dan integrasi layanan di tingkat desa belum berjalan optimal dan belum sepenuhnya terstruktur sesuai RAD. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama tidak semua perangkat daerah memiliki tenaga teknis khusus PAUD HI, membuat koordinasi bergantung pada personel dengan tugas tambahan sehingga pelaksanaan program belum maksimal. Keterbatasan anggaran juga memengaruhi jangkauan pelaksanaan program secara merata.

Selain itu, implementasi RAD masih dilakukan secara bertahap sehingga integrasi layanan di tingkat masyarakat belum optimal. Keterlambatan kegiatan lintas sektor terjadi karena melibatkan lebih dari satu perangkat daerah dalam waktu yang bersamaan. Tingkat komitmen dan kedisiplinan perangkat daerah dalam mengikuti rapat koordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan masih bervariasi. Koordinasi masih mengandalkan pendekatan persuasif karena mekanisme pengawasan dan sanksi belum diterapkan secara tegas, sehingga memengaruhi konsistensi pelaksanaan program PAUD HI.

4.4.3 Upaya BAPPERIDA dalam Meningkatkan Efektivitas Koordinasi PAUD Holistik Integratif

BAPPERIDA melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas koordinasi PAUD HI. Upaya utama adalah mendorong pembentukan dan penguatan Sub Gugus Tugas PAUD HI di tingkat desa agar terjadi keterpaduan antara kebijakan di tingkat kabupaten dan implementasi di tingkat desa. Koordinasi lintas sektor diperkuat melalui pelaksanaan rapat rutin, penyampaian

informasi terstruktur, serta penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah agar setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya.

BAPPERIDA juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan penguatan pemahaman mengenai konsep dan kebijakan PAUD HI. Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, dilakukan optimalisasi perencanaan dan penganggaran lintas sektor serta pemanfaatan sumber daya secara efisien. Selain itu, diupayakan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Penguatan implementasi RAD terus dilakukan agar menjadi pedoman bersama, disertai pemantauan dan evaluasi serta dorongan peningkatan komitmen dan kedisiplinan perangkat daerah dalam mengikuti rapat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. BAPPERIDA sebagai sekretariat PAUD Holistik Integratif berupaya meningkatkan efektivitas koordinasi penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif di Kabupaten Sikka melalui beberapa upaya dengan langkah strategis yang bersifat berkelanjutan dan lintas sektor, salah satunya dengan mendorong pembentukan serta penguatan Sub Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif di tingkat desa. Pembentukan Sub Gugus Tugas ini merupakan langkah penting dalam memperkuat koordinasi hingga ke tingkat pelaksana serta mewujudkan keterpaduan antara kebijakan di tingkat kabupaten dengan implementasi program di tingkat desa.
2. BAPPERIDA memperkuat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan seluruh perangkat daerah yang memiliki peran dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif. Upaya ini

dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin, penyampaian informasi yang terstruktur, serta penyelarasan pelaksanaan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

3. BAPPERIDA meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat pelaksanaan program PAUD Holistik Integratif, melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan pemahaman terkait konsep dan kebijakan PAUD Holistik Integratif, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, penguatan implementasi Rencana Aksi Daerah PAUD Holistik Integratif sebagai pedoman bersama, serta mendorong peningkatan komitmen dan kedisiplinan perangkat daerah dalam mengikuti rapat koordinasi dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala.

Saran

Berdasarkan hasil kegiatan magang dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAPPERIDA

BAPPERIDA diharapkan terus berupaya melakukan pembentukan sub gugus tugas PAUD HI didesa, merencanakan anggaran agar PAUD HI bisa diterapkan diseluruh wilayah, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan penguatan pemahaman PAUD HI, Mendorong peningkatan komitmen dan kedisiplinan perangkat daerah dalam mengikuti rapat dan pelaporan kegiatan. memberikan sanksi bagi perangkat daerah yang tidak terlibat dalam rapat koordinasi sehingga Implementasi PAUD HI dapat berjalan dengan baik.

2. Bagi Universitas Nusa Nipa

Universitas Nusa Nipa diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi akademik dan bahan pengembangan pembelajaran, khususnya terkait kebijakan PAUD Holistik Integratif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian lanjutan yang relevan dengan penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian pendidikan, Ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1-8.
- Agus, A. (2024). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan*, 7(2), 45-67.
- Budiarti, E., Rohmah, S., Kasiati, K., Pertiwi, H., & Umilia, U. (2022). Meningkatkan Pemahaman Pentingnya Makan Makanan Bergizi Seimbang Melalui Kegiatan Makan Bersama Di Ra Al Fata Rokan Hulu. *Healthy: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(4), 218-229.
- Daruhati, G., & Sopiati, P. (2024). Pengumpulan Data Penelitian. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5423-5443.
- Dini, J. P. A. U. (2022). Hambatan Implementasi Paud Berbasis Holistik Integratif. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(5), 5200-5208.
- Edo, J. A. R., Subagyo, A., & Permana, D. (2025). Koordinasi Badan Perencanaan Dan Pengembangan Daerah Dalam Kebijakan Penataan Ruang Aerotropolis Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka. *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 150-164.
- Evarista, B., Goo, E. E. K., & Meylano, N. H. (2025). Peran Bapperida dalam Mendorong Penerapan Layanan Paud Holistik Integratif di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 2987-2994.
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. Unj Press.
- Fadila, F., Safriani, S., Eliana, E., & Khaddafi, M. (2025). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Intelektual Cendekiawan*, 2 (7), 13446-13449.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 3(1), 11-21.
- In, I., Hendrowati, T. Y., & Aswat, F. H. (2024). Implementasi Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Satuan PAUD. *Manajemen Pendidikan*, 248-259.

- Irawan, R. J., Zahroh, S. N. A., Mawaddah, W., & Dartanyan, K. (2024). Kualitas Interaksi Sosial Antara Penjual dan Pembeli di Pasar Modern Bauntung Banjarbaru. *Jurnal Nirwasita*, 5(1), 58-68.
- Jannah, D. F., & Setiawan, R. (2022). Evaluasi implementasi Program PAUD Holistik Integratif. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 7163-7172.
- Keputusan Bupati Sikka Nomor 128/HK/2023 Tentang *Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sikka*.
- Keputusan Bupati Sikka Nomor 379/HK/2023 Tentang *Perubahan atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 128/HK/2023 tentang Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sikka*.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21 (2), 88-98.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142-152.
- Lailia, I., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(3), 194-207.
- Laowo, E. N., Hulu, F., Lahagu, P., & Mendrofa, S. A. (2024). Analisis Fungsi Koordinasi Kepala Desa Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sifalaete Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. *Visi Sosial Humaniora*, 5(2), 232-252.
- Ligina, B. D. A., Suarta, I. N., & Nurhasanah, N. (2022). Implementasi PAUD HI (Holistik Integratif) Pada TK di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(3), 1197-1207.
- Ligina, B. D. A., Suarta, I. N., & Nurhasanah, N. (2022). Implementasi PAUD HI (Holistik Integratif) Pada TK di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(3), 1197-1207.

- Maimunah, M., Aslamiah, A., Purwanti, R., Cinantya, C., & Anggreani, C. (2025). Panduan Teknis tentang Strategi Manajemen untuk Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif. *CONSEN: Jurnal Pelayanan Masyarakat dan Keterlibatan Indonesia*, 5 (2), 297-304.
- Natawibawa, I. W. Y., Mulya, I. M. O., & Pranoto, P. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana: Studi Pada Smkn 6 Kota Malang. *Monex: Journal of Accounting Research*, 9(1), 70-85.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pembangunan Dan Alam Lestari*, 5(1).
- Nurpahdi, M., Rustanto, A. E., Wicaksana, H. H., & Cholifihani, M. (2025). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang). *Jurnal Niara*, 18(2), 584-592.
- Pasaribu, M. H., Tambunan, Y. S., & Kaharuddin, K. (2022). Pengaruh Komunikasi dan Koordinasi Terhadap Efektivitas Kerja Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 1(4), 159-173.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Sikka*.
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 51 Tahun 2022 tentang *Standarisasi Layanan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 17 Tahun 2016 tentang *Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang *Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif*.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang *Percepatan Penurunan Stunting*.

- Permana, G. W., & Sulistiyo, H. (2025). *Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Pranomo, J. P. S. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Rahman, A., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Ramazhana, D. A., & A'yun, D. Q. (2024). Analisis Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Siswa. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 2(2), 44-53.
- Raudah, S. (2023). Implementasi Batas Minimal Usia Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 6(2), 1201-1218.
- Rencana Aksi Daerah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Sikka Tahun 2024–2028.
- Sari, D. R., & Arifin, I. (2023). Implementasi pendidikan holistik integratif pada pembelajaran montessori untuk menstimulus kemandirian anak di tk dharma wanita persatuan 3 malang. *Journal Of Early Childhood And Islamic Education*, 1(2), 92-104.
- Sos, J. P. S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Wicaksono, BT, Hidayat, W., & Labib, MM (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Idarotuna: Jurnal Ilmu Administrasi* , 6 (2), 327-337.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah dan Efektivitas Kebijakan Kesejahteraan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1323-1332.

- Wulandari, R. F., Sulistyaningtyas, L., & Jaya, S. T. (2021). Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Gizi Ibu Hamil. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 155-161.
- Wulandari, S. D., & Salam, R. (2022). Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tangerang Selatan. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 534-548.